

MENGURAI KEGAGALAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM PEMILU 2024: SEBUAH REVIEW POST-ISLAMISM TERHADAP DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Putu Ari Saruhum Hasibuan¹
¹Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
putuari@uwks.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4464>

Received: 21 Mei 2025

Revised: 23 Mei 2025

Accepted: 23 Mei 2025

Abstrak

Pemilu 2024 menandai titik kritis bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai Islam tertua di Indonesia, yang mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara. Artikel ini bertujuan untuk mengurai faktor-faktor kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan pendekatan literature review, serta memetakan dinamika politik Islam kontemporer di Indonesia dalam kerangka teori pasca-Islamisme. Temuan utama menunjukkan bahwa kegagalan PPP disebabkan oleh kombinasi dari dinamika internal partai, fragmentasi di antara partai-partai Islam, dan pergeseran preferensi pemilih yang semakin rasional dan pragmatis, terutama di kalangan pemilih muda. Selain itu, tantangan eksternal berupa dominasi partai nasionalis dan keterbatasan strategi koalisi memperburuk posisi PPP. Dalam konteks ini, Bayat, A. (2005) yang berjudul *Post-Islamism*, dimana pasca-Islamisme menawarkan lensa kritis untuk memahami transformasi partai-partai Islam dari ideologi eksklusif menuju pendekatan yang lebih plural dan demokratis. Studi ini menyimpulkan bahwa masa depan partai-partai Islam sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan sosial-politik dan tuntutan demokratisasi.

Kata Kunci: Partai, Post-Islamism, Politik Islam

Abstract

The 2024 election marks a critical point for the United Development Party (PPP), one of the oldest Islamic parties in Indonesia, which has experienced a significant decline in vote acquisition. This article aims to unravel the factors behind PPP's failure in the 2024 election using a literature review approach, as well as to map the dynamics of contemporary Islamic politics in Indonesia within the framework of post-Islamism theory. The main findings indicate that PPP's failure is caused by a combination of internal party dynamics, fragmentation among Islamic parties, and a shift in voter preferences that are increasingly rational and pragmatic, particularly among young voters. Additionally, external challenges such as the dominance of nationalist parties and limitations in coalition strategies have exacerbated PPP's position. In this context, Bayat, A. (2005) in his work titled "Post-Islamism," offers a critical lens to understand the transformation of Islamic parties from exclusive ideologies to a more plural and democratic approach. This study concludes that the future of Islamic parties heavily depends on their ability to adapt to socio-political changes and the demands for democratization.

Keywords: Party, Post-Islamism, Islamic Politics

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 merupakan salah satu momen penting dalam dinamika politik Indonesia, terutama bagi partai-partai politik yang mewakili berbagai ideologi dan kepentingan sosial. Di antara banyaknya partai yang berkompetisi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, mengalami kegagalan yang cukup signifikan dalam Pemilu 2024. Kekalahan ini menarik perhatian karena partai ini memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia dan telah memainkan peran penting dalam pemerintahan sebelumnya. Namun, meskipun memiliki sejarah yang cukup baik, PPP gagal mempertahankan posisi kuatnya dalam Pemilu 2024. Artikel ini bertujuan untuk mengurai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, dengan fokus pada dinamika politik Islam di Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai yang memiliki akar kuat dalam ideologi Islam. Sejak didirikan pada tahun 1973, PPP berusaha menjadi wadah bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Pada beberapa Pemilu sebelumnya, PPP berhasil mendapatkan jumlah kursi yang signifikan di parlemen, namun pada Pemilu 2024, mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan ini menciptakan berbagai pertanyaan terkait dengan mengapa partai yang memiliki sejarah panjang dan basis massa yang cukup besar bisa gagal bersaing di tingkat nasional.

Dalam konteks politik Indonesia, khususnya dalam politik Islam, kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 juga mencerminkan perubahan besar dalam lanskap politik Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, partai-partai Islam di

Indonesia semakin menghadapi tantangan berat, baik dari dalam internal partai maupun dari luar, berupa pergeseran preferensi politik masyarakat yang semakin beragam. Fenomena ini mencerminkan dinamika politik Islam yang semakin kompleks di Indonesia. Kegagalan PPP tidak hanya berakar pada masalah internal partai, tetapi juga pada pengaruh perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan PPP dalam Pemilu 2024.

Dalam pasca-islamisme, dimana Bayat menganalisis kemunculan dan implikasinya di berbagai negara, termasuk Iran, Turki, Maroko, Indonesia, Mesir, dan Pakistan, menyoroti beragam lintasan dan transformasi Islam politik dalam konteks ini. Ini mengkritik perspektif internal dan eksternal tentang Pasca-Islamisme, memeriksa bagaimana gerakan dan ideologi politik yang berbeda beradaptasi dengan perubahan lanskap sosial dan politik, serta keterbatasan dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan Pasca-Islam di negara-negara seperti Arab Saudi dan Sudan (Bayat, 2013). Sementara Partai-Islam di Indonesia belum berbagi perjuangan bersama sebagai partai Ideologis. Studi ini menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif kontribusi dan tantangan partai-parpol Islam di Indonesia, menyoroti bahwa keberadaan partai-partainya ini tidak bertentangan dengan demokrasi melainkan berkontribusi pada proses demokratisasi di negara masing-masing (Ummatin, 2020). Ini menyoroti bahwa PPP menekankan prinsip-prinsip seperti konsultasi (musyawarah) dan keadilan, yang memandu tindakan politik dan proses

pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik, mencerminkan komitmen terhadap demokrasi sambil menavigasi tantangan mempertahankan relevansi dalam lanskap politik yang kompetitif.

Studi kasus dimana partai-partai Islam selama pemilihan gubernur Jakarta 2017 tidak hanya dipengaruhi oleh ekspektasi konstituen tetapi juga oleh kepentingan elit dan organisasi partai-partainya. Ini menunjukkan proses pengambilan keputusan yang kompleks yang melampaui penyelarasan ideologis sederhana. Dampak elektoral dari keputusan ini mengungkapkan bahwa isu-isu agama memainkan peran penting dalam menentukan elektabilitas, dengan PKS mendapat manfaat dari elektabilitas yang lebih tinggi karena keselarasan dengan sentimen agama konstituen, sementara PKB dan PPP, yang mendukung Ahok-Djarot, mengalami penurunan dukungan mereka (Herdiansah et al., 2019). Beberapa faktor yang perlu dicermati dalam konteks kegagalan PPP adalah pertama, dinamika internal partai yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan ketidaksepakatan di antara elit partai. Hal ini tidak hanya mengganggu konsolidasi partai, tetapi juga mempengaruhi kemampuan PPP dalam menarik pemilih. Kedua, dinamika politik Islam yang semakin terfragmentasi, di mana terdapat persaingan yang ketat antara partai-partai Islam, seperti PPP, PKS, dan PAN, yang masing-masing memiliki strategi dan basis pemilihnya sendiri. Ketiga, pemilih muda yang semakin cerdas dalam menilai calon legislatif dan partai politik yang mewakili mereka, serta kecenderungan masyarakat yang semakin pragmatis dalam memilih partai dan kandidat yang memiliki program kerja yang jelas dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, faktor eksternal juga memainkan peranan penting dalam kegagalan PPP. Salah satunya adalah perkembangan politik di Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh aliansi-aliansi politik yang terjadi di luar ranah politik Islam. Banyak partai politik besar yang mengusung ideologi nasionalis atau lainnya, namun memiliki daya tarik yang lebih besar bagi pemilih karena dianggap lebih inklusif dan tidak terbatas pada satu kelompok ideologi tertentu. Keadaan ini menyebabkan partai-partai politik Islam seperti PPP kesulitan untuk menarik perhatian pemilih yang lebih luas. PPP, meskipun berusaha membangun koalisi dengan partai-partai politik lainnya, termasuk dengan partai yang mengusung ideologi nasionalis dan sosial-demokrasi, gagal memaksimalkan peluang tersebut dalam Pemilu 2024. Dalam upaya membangun koalisi yang kuat, PPP tidak hanya menghadapi tantangan internal partai, tetapi juga tantangan eksternal yang datang dari kompetitor politik lainnya, baik dari dalam maupun luar ranah politik Islam. Namun, meskipun PPP mengalami kekalahan yang signifikan, masih terdapat banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hasil Pemilu 2024 ini. Penting untuk melihat bahwa kegagalan PPP bukan semata-mata disebabkan oleh kegagalan strategi partai atau kebijakan yang tidak relevan, melainkan juga akibat dari perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia memandang partai politik dan calon legislatif. Oleh karena itu, penting bagi partai politik Islam, termasuk PPP, untuk melakukan refleksi dan evaluasi mendalam terhadap bagaimana mereka berkomunikasi dengan pemilih, terutama di kalangan pemilih muda, yang semakin menentukan arah politik Indonesia ke depan.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai faktor yang berkontribusi pada kegagalan PPP dalam

Pemilu 2024. Pembahasan akan mencakup analisis terhadap dinamika internal partai, strategi kampanye yang diambil, serta tantangan yang dihadapi oleh partai politik Islam di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan melihat peran penting perubahan sosial dan kebijakan dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat, khususnya dalam konteks partai-partai politik Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kegagalan PPP dan bagaimana hal tersebut mencerminkan dinamika politik Islam di Indonesia dalam Pemilu 2024. Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi penyebab kegagalan PPP dalam Pemilu 2024, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam politik Islam di Indonesia. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi bagi studi-studi politik, khususnya dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh partai-partai politik Islam di Indonesia dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tetap relevan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah literature review atau tinjauan pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 2024, dengan mengaitkannya dengan dinamika politik Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini lebih mengutamakan analisis terhadap literatur yang relevan, baik yang bersifat teoritis maupun empiris, yang telah dipublikasikan sebelumnya, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diangkat.

Proses literature review dalam penelitian ini akan mencakup pengumpulan, analisis, dan sintesis berbagai referensi yang berkaitan dengan dinamika politik Islam, khususnya dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Sumber utama yang akan dijadikan rujukan adalah buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen yang relevan. Salah satu literatur penting yang akan digunakan adalah buku Bayat, A. (2005) yang berjudul *Post-Islamism?* Buku ini memberikan pemahaman tentang pergeseran ideologi dalam politik Islam, yang merupakan salah satu kunci dalam memahami mengapa partai-partai Islam, termasuk PPP, mengalami kegagalan di Pemilu 2024. Konsep *Post-Islamism* dalam buku ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana pergeseran ideologi dan dinamika pemilih di Indonesia berdampak pada partai-partai Islam.

Referensi dari literatur lain Kitab tafsir Fi Zhilalil Quran karya Sayyid Qutb mengenai politik Islam, dan juga jurnal, artikel yang membahas pemilu Indonesia, politik Islam di negara demokrasi, serta kajian-kajian tentang sejarah dan perkembangan PPP, juga akan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Dalam hal ini, fokus penelitian adalah menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan PPP, baik dari segi internal partai maupun faktor eksternal yang meliputi perubahan sosial, politik, dan kebijakan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Langkah-Langkah Literature Review adalah pertama, memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih akan berasal dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, artikel jurnal, serta publikasi ilmiah terkait dengan politik Islam, dinamika pemilu Indonesia, dan sejarah perkembangan PPP. Literatur tersebut harus memberikan wawasan tentang kondisi politik saat ini serta pergeseran-pergeseran yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait dengan

politik Islam. Setelah literatur terkumpul, langkah kedua adalah melakukan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut. Fokus analisis adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam Pemilu 2024 dan bagaimana partai-partai politik Islam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Literatur yang membahas *Post-Islamism* dan pergeseran ideologi dalam politik Islam akan menjadi sumber utama untuk mengidentifikasi perubahan dalam sikap politik masyarakat terhadap partai-partai Islam, termasuk PPP. Selanjutnya, yang ketiga, hasil analisis literatur akan disintesis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pemahaman yang ada. Sintesis ini akan membantu membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai kegagalan PPP dalam Pemilu 2024. Temuan dari literatur akan dihubungkan dengan data empiris yang ada untuk memperkaya analisis. Yang keempat, berdasarkan sintesis literatur, kesimpulan akan ditarik untuk menjelaskan mengapa PPP gagal dalam Pemilu 2024. Implikasi dari temuan ini juga akan dibahas, khususnya bagi partai-partai politik Islam di Indonesia yang ingin tetap relevan dalam pemilu-pemilu mendatang.

Metode literature review ini memberikan keuntungan utama berupa pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik Islam dan kegagalan PPP tanpa harus mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara. Dengan menganalisis literatur yang sudah ada, penelitian ini dapat menggali berbagai perspektif dan temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan berbasis pada kajian akademis yang telah teruji. Selain itu, literature review juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi terhadap kajian lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pemikiran Sayyid Quthb tentang politik Islam yang dapat disimpulkan dari kitab *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, menurut A. Ilyas Ismail berupa gagasan tentang *hakimiyyah*, *jahiliyyah* dan *tajhil*, perjuangan Islam atau perang suci (*jihad*), serta revolusi Islam (*tsaurat al-Islamiyyah*) yang dijabarkan dalam metode konsep politik dalam al-Qur'an mengenai kehidupan, kedaulatan Tuhan, tujuan negara, prinsip-prinsip pemerintahan, konsep kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip kebijaksanaan negara.

Konsep pasca-Islamisme, sebagaimana diartikulasikan oleh Asef Bayat, memberikan kerangka kerja untuk memahami evolusi partai-parpol Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Indonesia, dalam konteks Pemilu 2024. Pasca-Islamisme mewakili pergeseran dari ideologi Islam tradisional menuju pendekatan yang lebih pluralistik dan demokratis, menekankan hak-hak, kebebasan sipil, dan pemisahan agama dari politik. Transformasi ini sangat penting untuk memahami bagaimana partai-partaian Islam seperti PPP dapat menyesuaikan strategi dan ideologi mereka dalam menanggapi perubahan lanskap politik dan harapan masyarakat.

Evolusi partai-parpol Islam dari pendekatan berorientasi ideologi ke pendekatan berorientasi kebijakan, menekankan pentingnya pendekatan maqasid, yang berfokus pada tujuan Islam yang lebih tinggi. Pergeseran ini dipandang penting bagi partai-partai ini untuk mempertahankan legitimasi Islam sambil menangani kebutuhan sosial-politik dan ekonomi daerah pemilihan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya sistem yang dapat disebut 'demokrasi Islam'. Analisis ini menyoroti keberhasilan elektoral partai yang

berorientasi Islam dalam pemilihan pasca-pemberontakan di Tunisia dan Mesir, di mana partai-partai ini telah berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi sambil menavigasi kompleksitas sekularisme dan identitas Islam, menunjukkan potensi untuk pendekatan pemerintahan yang lebih terintegrasi yang menghormati nilai-nilai Islam dan norma-norma demokrasi (Rane, 2013).

Gagasan Asef Bayat tentang “pasca-Islamisme” dengan mengusulkan definisi alternatif yang mempertimbangkan kompleksitas gerakan Islam pasca-revolusioner di Iran, menyoroti bahwa gerakan-gerakan ini menolak kekuasaan negara dan bahwa konsesi Khomeini terhadap masalah menunjukkan pergeseran ke arah akal modern atas hukum syariah di dalam negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pasca-Islamisme tidak boleh dilihat sebagai pemutusan total dari Islamisme, melainkan sebagai kebangkitan yang mengkritik kecenderungan otoriter dan universalis sambil mempertahankan etos tradisional Islamisme, dengan fondasi filosofis yang diletakkan oleh tokoh-tokoh seperti Abdolkarime Soroush dan Morteza Avini, yang mendekati konsep dari sudut yang berbeda (Dokhanchi, 2020).

Prinsip-prinsip pasca-Islamisme secara signifikan mempengaruhi dinamika internal dan strategi pemilihan partai-partai Islam seperti Partai-Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia. Pasca-Islamisme, yang ditandai dengan pergeseran menuju inklusivitas, moderasi, dan keterlibatan demokratis, mempengaruhi bagaimana partai politiknya menavigasi aliansi politik, strategi pemilihan, dan komitmen ideologis. Transformasi ini terbukti dalam cara partai-partai Islam beradaptasi dengan perubahan lanskap politik, seringkali menyeimbangkan antara kemurnian ideologis dan strategi pemilihan pragmatis untuk mempertahankan relevansi dan daya

tarik bagi pemilih yang lebih luas. Bagian berikut mengeksplorasi dinamika ini secara rinci.

Pasca-Islamisme dan Karakteristiknya

Asef Bayat menggambarkan pasca-Islamisme sebagai fase di mana gerakan Islam beralih dari fokus pada penerapan hukum syariah ke merangkul prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan pluralisme. Pergeseran ini ditandai dengan perpindahan dari tugas ke hak, dan dari suara otoritatif tunggal ke pluralitas perspektif (Bayat, 2005). Konsep pasca-Islamisme bersifat cair dan bervariasi di berbagai konteks, tetapi umumnya melibatkan pemikiran ulang tentang peran Islam dalam politik, seringkali mengarah pada pendekatan yang lebih moderat dan inklusif (Imad, 2019). Analisis Murphey mengungkapkan bahwa Salafisme, khususnya dalam konteks Prancis, mewakili fenomena postmodern yang ditandai dengan pemisahan dari masyarakat arus utama dan sosialisasi ulang ke dalam pandangan dunia Salafi. Ini termasuk oposisi moral terhadap masyarakat dominan dan keyakinan akan ketidaksempurnaan struktur politik, yang mengarah pada bentuk kelelahan politik dan penciptaan dunia kontra yang ada paralel dengan, namun bertentangan dengan, norma-norma sosial yang lebih luas (Murphey, 2020).

Hasilnya menunjukkan bahwa pemikiran sekuler dan liberal hadir dalam pasca-Islamisme, yang sejalan dengan kritik terhadap Islamisme, menunjukkan perlunya transformasi di antara kaum Islamis menuju pendekatan pasca-Islamisme yang mencakup sekularisme dan liberalisme. Studi ini mengklarifikasi wacana seputar Islam politik, khususnya dalam kaitannya dengan isu-isu sekularisme, liberalisme, dan demokrasi, dan menggunakan Model Politik Turki sebagai titik referensi, menyoroti bahwa itu mewujudkan konsep politik sekuler (Othman & Boyman, 2018). Pasca-

Islamisme mendorong partai-partai Islam untuk membentuk aliansi dengan partai-partai yang lebih liberal atau sekuler untuk memperluas daya tarik mereka dan meningkatkan pengaruh politik mereka. Misalnya, Partai Islam Se-Malaysia (PAS) terlibat dalam tahalluf siyasi (aliansi politik) dengan partai-partai liberal seperti Parti Aksi Demokratik (DAP) dan Parti Keadilan Rakyat (PKR) di Malaysia, yang didorong oleh prinsip-prinsip inklusivitas dan partisipasi (Mutalib & Zakaria, 2015). Aliansi semacam itu sering mengharuskan partai-partai Islam untuk berkompromi pada prinsip-prinsip ideologis tertentu, yang dapat menyebabkan ketegangan internal dan hilangnya dukungan dari konstituen yang lebih konservatif. PAS, misalnya, mengalami penurunan suara Muslim karena koalisinya dengan DAP, menyoroti potensi risiko elektoral dari strategi tersebut (Mutalib & Zakaria, 2015)

Teori Kelembagaan dan Dinamika Partai

Teori kelembagaan partai politik menunjukkan bahwa partai politik berkembang sebagai respons terhadap lingkungan politiknya. Di Indonesia, teori inklusi moderasi telah menunjukkan bahwa partai-partai Islam seperti PPP telah memoderasi ideologi mereka karena mereka berpartisipasi dalam politik pemilu yang kompetitif (Tomsa, 2019). Moderasi ini tidak hanya ideologis tetapi juga strategis, karena partai-parpol berusaha memperluas daya tarik mereka dan tetap relevan dalam lanskap politik yang berubah. PPP, misalnya, telah bergerak menuju sikap Islam konservatif yang lebih arus utama, yang mencerminkan tren moderasi yang lebih luas di kalangan partai politik-partai politik-partai Islam di Indonesia (Tomsa, 2019).

Evolusi PPP dapat dilihat sebagai bagian dari tren pasca-Islam yang lebih luas di mana partai-parpol Islam mempertahankan identitas agama mereka sambil beradaptasi dengan norma-norma demokrasi. Ini melibatkan

menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan tuntutan sistem politik pluralistik (Tajuddin, 2016). Pergeseran PPP menuju pasca-Islamisme mungkin melibatkan penerapan strategi serupa dengan yang terlihat di negara-negara lain, seperti AKP Turki, yang telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pemerintahan demokrasi (Rane, 2013). Karya Asef Bayat tentang pasca-Islamisme meneliti bagaimana umat Islam telah mendefinisikan kembali Islam secara demokratis dalam konteks sosial-politik mereka. Perspektif ini sangat penting untuk memahami evolusi partai-parpol Islam, seperti Parti Persatuan Pembangunan (PPP), saat mereka menavigasi lanskap politik modern. Teori Kelembagaan Partai-Parti Politik menyoroti interaksi antara struktur internal suatu parpol dan komitmen ideologisnya, yang dapat mempengaruhi perilaku dan strategi PPP dalam konteks pasca-pemilu 2024, khususnya mengenai ideologi Islam. Moderasi platform politik adalah strategi kunci bagi partai-partai Islam di bawah pasca-Islamisme, karena dapat meningkatkan daya tarik pemilihan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa platform moderat secara positif terkait dengan tingkat dukungan pemilu yang lebih tinggi, meskipun efek ini dikondisikan oleh faktor-faktor seperti keterbukaan ekonomi (Yildirim & Lancaster, 2015). Di Indonesia, PPP telah mempertahankan pendekatan pasca-Islam dalam program politiknya, yang bertujuan untuk menarik pemilih yang lebih luas meskipun perolehan suara stagnan. Ini mencerminkan pilihan strategis untuk menyeimbangkan komitmen ideologis dengan pertimbangan pemilu pragmatis (Argenti et al., 2022).

Tantangan dan Peluang

Sementara pasca-Islamisme menawarkan jalur bagi partai-partai Islam

untuk terlibat secara lebih konstruktif dalam politik demokratis, hal itu juga menghadirkan tantangan. Transisi membutuhkan navigasi ketegangan antara nilai-nilai agama tradisional dan tuntutan politik modern (Zherlitsyna, 2022). Di Indonesia, moderasi partai-partai Islam belum tentu mengarah pada pendalaman demokrasi, karena partai-parpol sekuler juga bergerak menuju konservatisme agama, memperumit lanskap politik (Tomsa, 2019). Selain itu dinamika kelembagaan intra party mampu mempengaruhi moderasi partai Islam dan perilaku serta ideologinya. Dimana moderasi dipandang sebagai perilaku strategis dalam partai-partai Islam, dipengaruhi oleh dinamika organisasi (Wuthrich & Ciftci, 2020). Dinamika kelembagaan intraparty yang mempengaruhi moderasi partainya Islam, yang dapat dikaitkan dengan konteks yang lebih luas dari pasca-Islamisme seperti yang dieksplorasi oleh Asef Bayat. Ini menekankan bagaimana struktur internal dan perilaku strategis membentuk ideologi dan tindakan partai-partai Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Indonesia. Memahami dinamika ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana ideologi Islam dapat berkembang dan bermanifestasi dalam perilaku partainya setelah pemilihan 2024.

Berbeda dengan pandangan optimis pasca-Islamisme sebagai kekuatan demokratisasi, beberapa sarjana berpendapat bahwa konsep tersebut tetap ambigu dan dampaknya terhadap sistem politik tidak seragam. Sifat cair pasca-Islamisme berarti bahwa manifestasinya dapat bervariasi secara signifikan di berbagai konteks, dan keberhasilannya dalam mempromosikan demokrasi dan pluralisme tidak dijamin (Imad, 2019)]. Hal ini menyoroti kompleksitas penerapan pasca-Islamisme sebagai kerangka kerja untuk memahami evolusi partai-parpol Islam seperti PPP di Indonesia. Pasca-

Islamisme melibatkan transformasi dalam sikap ideologis partai-partai Islam, seringkali mengarah pada pendekatan yang lebih demokratis dan pluralistik. Transformasi ini terbukti dalam pengalaman partai-partai seperti Ennahda di Tunisia dan Parti Keadilan dan Pembangunan di Maroko, yang telah mengadopsi sistem politik demokrasi sipil dan menjauh dari Islamisasi masyarakat dari atas (Zherlitsyna, 2022). Namun, pergeseran ini juga dapat menyebabkan tantangan internal, karena para pihak harus menavigasi ketegangan antara mempertahankan kemurnian ideologis dan beradaptasi dengan tuntutan pemilih yang beragam. PPP, seperti partai-partai Islam lainnya, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tuntutan yang bersaing ini sambil berusaha untuk tetap relevan dalam lanskap politik (Teik et al., 2014) (Cavatorta & Merone, 2018)].

Sementara pasca-Islamisme menawarkan peluang partai politik Islam untuk memperluas pengaruh politik mereka dan menarik pemilih yang lebih luas, hal itu juga menghadirkan tantangan terkait kompromi ideologis dan strategi pemilihan. Pengalaman partai-pihak seperti PAS dan PPP menggambarkan kompleksitas menavigasi dinamika ini, karena mereka harus menyeimbangkan tuntutan inklusivitas dan moderasi dengan kebutuhan untuk mempertahankan komitmen ideologis inti. Tindakan penyeimbangan ini sangat penting untuk relevansi dan keberhasilan mereka yang berkelanjutan di arena politik.

KESIMPULAN

Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 2024 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebuah refleksi dari perubahan besar dalam dinamika politik Islam di Indonesia. Sebagai salah satu partai Islam tertua yang memiliki akar historis sejak

masa Orde Baru, kegagalan PPP merepresentasikan tantangan yang dihadapi oleh partai-partai berbasis agama dalam menavigasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks di era kontemporer. Salah satu temuan utama dari studi ini adalah bahwa faktor internal partai memainkan peran signifikan dalam melemahkan kinerja PPP. Konflik internal, ketidaksepakatan di antara elit, serta ketidakmampuan partai untuk menyatukan visi dan strategi menyebabkan lemahnya konsolidasi politik di tubuh partai. Hal ini berimplikasi langsung terhadap penurunan kepercayaan publik, terutama di kalangan basis pemilih tradisional PPP yang selama ini diandalkan. Kepemimpinan yang tidak solid dan strategi kampanye yang kurang responsif terhadap kebutuhan zaman semakin memperparah ketertinggalan PPP dari kompetitor politiknya.

Selain itu, dalam konteks eksternal, PPP menghadapi persaingan yang semakin tajam dari partai-partai Islam lain seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang berhasil mengadopsi strategi komunikasi politik yang lebih adaptif, serta menampilkan citra yang lebih relevan bagi pemilih muda dan perkotaan. Fragmentasi politik Islam di Indonesia menyebabkan pemilih Islam tidak lagi memiliki satu pilihan dominan, melainkan tersebar di antara berbagai partai yang menawarkan platform serupa dengan variasi pendekatan yang berbeda. Pergeseran orientasi pemilih menjadi faktor penting dalam kegagalan PPP. Pemilih muda saat ini cenderung lebih rasional, pragmatis, dan mengutamakan program kerja konkret daripada sekadar afiliasi ideologis. Dalam hal ini, partai-partai yang mampu menawarkan narasi pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan solusi terhadap persoalan keseharian masyarakat lebih menarik perhatian publik dibandingkan dengan partai-partai yang terlalu fokus pada isu ideologis

keagamaan. PPP tampaknya gagal membaca perubahan orientasi ini dan tetap terpaku pada pendekatan tradisional, sehingga kehilangan relevansi di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Studi ini juga menyoroti pentingnya konsep *pasca-Islamisme* dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh PPP dan partai Islam lainnya. Dalam kerangka *pasca-Islamisme*, terjadi pergeseran dari pendekatan Islam politik yang rigid menuju praktik politik yang lebih inklusif, demokratis, dan pluralistik. Banyak partai Islam di dunia, seperti Ennahda di Tunisia dan AKP di Turki, mulai mengadaptasi prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak sipil dalam platform politik mereka sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang lebih beragam. PPP, meskipun telah menunjukkan beberapa upaya untuk memoderasi ideologinya, belum berhasil mentransformasikan dirinya secara utuh menjadi partai Islam yang modern dan adaptif. Peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan PPP melalui koalisi politik juga gagal dimaksimalkan. Meskipun PPP sempat mencoba membangun aliansi strategis dengan partai-partai nasionalis dan moderat, aliansi ini tampak tidak terstruktur dengan baik dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap elektabilitas partai. Koalisi yang dibangun lebih bersifat taktis daripada strategis, sehingga gagal memberikan sinyal kuat kepada pemilih tentang posisi dan arah perjuangan politik PPP dalam jangka panjang.

Kesimpulannya, kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 mencerminkan berbagai tantangan multidimensional yang dihadapi oleh partai Islam di Indonesia. Tantangan ini meliputi persoalan internal partai, perubahan demografi dan preferensi pemilih, kompetisi yang semakin ketat dari partai Islam lain, serta transformasi sosial-politik yang mendorong kebutuhan akan pendekatan politik yang lebih moderat dan

inklusif. Oleh karena itu, PPP dan partai Islam lain perlu melakukan refleksi mendalam, tidak hanya dari segi ideologi, tetapi juga dalam hal strategi organisasi, komunikasi politik, serta kemampuan beradaptasi dengan realitas baru demokrasi Indonesia. Diperlukan langkah-langkah strategis dan berani untuk mereformasi struktur internal, membangun kembali kepercayaan publik, dan memperbaharui platform politik yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, PPP harus mampu merumuskan narasi politik yang tidak hanya bernuansa keislaman, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lapangan kerja. Jika tidak, bukan tidak mungkin PPP akan semakin kehilangan relevansi dan dukungan dalam kontestasi politik mendatang. Dalam konteks ini, studi ini memberikan kontribusi penting bagi wacana politik Islam kontemporer di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan partai Islam tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan ideologi, melainkan oleh kemampuan partai tersebut untuk membaca perubahan zaman dan meresponsnya dengan cara yang cerdas dan inovatif. Hanya dengan begitu, partai-partai Islam dapat terus memainkan peran penting dalam proses demokratisasi Indonesia yang semakin matang dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutalib, M. F. M., & Wan Zakaria, W. F. A. (2015). *Pasca-Islamisme Dalam PAS: Analisis Terhadap Kesan Tahalluf Siyasi/Post-Islamism in PAS: An Analysis on the Impact of Tahalluf Siyasi*. 8 (52). DOI: [10.24035/ijit.08.2015.006](https://doi.org/10.24035/ijit.08.2015.006)
- Argenti, G., Paskarina, C., & Darmayanti, N. (2022). Post-Islamism in Indonesia: Analysis of Islamic Political Party Programs in the 2019 National Elections. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11 (1), 127. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0011>
- Bayat, A. (2005). *Post-Islamism?16* (1), 5. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2716051/view>
- Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ACPROF/O9780199766062.001.0001>
- Cavatorta, F., & Merone, F. (2018). *Islamist Parties and Transformation in Tunisia and Morocco* (pp. 11–30). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/OSO/9780190876036.003.0002>
- Dokhanchi, M. (2020). *Post-Islamism Redefined: Towards a politics of post-Islamism*. 1 (1), 28–54. <https://doi.org/10.37264/JCSI.V1I1.13>
- Herdiansah, A., Setiabudi, W., Saputra, D., & Saputera, A. (2019). Islamic parties between pragmatism vs. ideological principle: the case of 2017 jakarta gubernatorial election. *Humanities and Social Sciences*, 7 (4), 1011–1017. <https://doi.org/10.18510/HSSR.2019.7.4138>
- Imad, A. G. (2019). Post-Islamism: Ideological Delusions and Sociological Realities. *Contemporary Arab Affairs*, 12 (3), 3–20. <https://doi.org/10.1525/CAA.2019.123001>
- Murphey, H. L. (2020). *The Politics of Islamism and Salafism Revisited: A Review Essay*. 10 (1). <https://doi.org/10.29311/NMES.V10I1.3759>
- Mutalib, M. F., & Zakaria, W. F. A. (2015). *Pasca-Islamisme dalam PAS:*

- analisis terhadap kesan tahalluf siyasi.* 8 (1), 52–60. <https://doi.org/10.24035/IJT.08.2015.006>.
- Othman, M. A., & Boyman, S. N. (2018). Political Islam in Islamism and Post Islamism: A Study on Islamic Renaissance Front (IRF). *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8 (1), 676–702. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/V8-I1/3840>
- Rane, H. (2013). The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions. *The Journal of Law and Religion*, 28 (2), 489–520. <https://doi.org/10.1017/S0748081400000126>
- Tajuddin, A. (2016). Development, Democracy, and Post-Islamism in Indonesia. *International Journal of Social Science Studies*, 4 (11), 41–50. <https://doi.org/10.11114/IJSS.V4I11.1924>
- Teik, K. B., Hadiz, V. R., & Nakanishi, Y. (2014). *Between dissent and power: The transformation of Islamic politics in the Middle East and Asia*. Palgrave Macmillan. <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB16135611>
- Tomsa, D. (2019). *Islamism and Party Politics in Indonesia*. <https://doi.org/10.1093/ACREFOR/E/9780190228637.013.1157>
- Ummatin, K. (2020). *Demokratisasi Dalam Politik Kepartaian Islam: (Studi Komparatif PPP di Indonesia dan PAS di Malaysia)*. 1 (1), 19–30. <https://doi.org/10.53491/POROSO.NIM.V1I1.23>
- Wuthrich, F. M., & Ciftci, S. (2020). Islamist parties, intraparty organizational dynamics, and moderation as strategic behaviour. *Mediterranean Politics*, 27 (3), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13629395.2020.1790165>
- Yildirim, A. K., & Lancaster, C. M. (2015). Bending with the Wind: Revisiting Islamist Parties' Electoral Dilemma. *Politics and Religion*, 8 (3), 588–613. <https://doi.org/10.1017/S1755048315000310>
- Zherlitsyna, N. A. (2022). *Post-Islamism: From Islamism to Muslim Democracy? Transformation of Islamist Parties in Tunisia and Morocco*. 8 (50), 1-29. <https://doi.org/10.31857/s032150750021339-4>